

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NO.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PERCERAIAN
KARENA DUALISME DALAM BERAGAMA**
(Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

BAYU PUTRA
NPM: 1621010003
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)



FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NO.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PERCERAIAN
KARENA DUALISME DALAM BERAGAMA**
(Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

BAYU PUTRA

NPM: 1621010003

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keharmonisan keluarga, Apabila dalam sebuah keluarga jauh dari kata harmonis dan rukun bahkan cenderung bertengkar, maka Allah bukakan suatu jalan yakni perceraian. Perceraian dapat terjadi akibat bermacam-macam hal, salah satunya yaitu telah terjadi pernikahan seorang muslim di mana sebelum menikah suami beragama Kristen. Selepas menikah sering terjadi pertengkaran karena suami tidak menunjukkan sebagai seorang muslim dan lalai dalam menjalankan ajaran Agama Islam. Maka dari itu hakim dalam memutus suatu perkara harus mengikuti asas *ratio decidendi* yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Maka putuslah perkawinan yang disebabkan *syiqaq* dengan istri yang menggugat atau disebut *khulu'*. Namun pengadilan agama memutusnya dengan penjatuhan talak satu *bain sughra*. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No:0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus cerai gugat dikarenakan dualisme dalam beragama ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang dikarenakan dualisme dalam beragama, dan ditinjau dari aspek hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Data primer penelitian ini yaitu diperoleh dari sumbernya langsung yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sumber data sekunder yaitu Putusan perkara Nomor:0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk, studi dokumentasi, studi pustaka, refrensi, buku jurnal, buku-buku ilmiah, dan kompilasi hukum Islam. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Kesimpulan penelitian ini adalah dalam memutus perkara, majelis hakim mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan keadaan penggugat dan tergugat. Dalam perkara ini terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena ketidakseriusan suami menjadi *mualaf*, tidak menjalankan syariat Islam. Perkara ini termasuk perkara *syiqaq* dikarenakan dualisme dalam beragama. Maka dari itu, majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan talak satu *bain sughra*. Dilihat dari hukum Islam, jika suami yang *mualaf* dan dia tidak sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, bahkan membohongi isterinya untuk melakukan pemberkatan pernikahan, maka dia termasuk orang yang murtad. Sesungguhnya status agama suami masih diragukan dan dapat menjadi alasan istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Putra

NPM : 1621010003

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk. tentang perceraian karena dualisme dalam beragama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saudara karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 9 Juli 2020

Penulis

Bayu Putra
NPM.1621010003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Bayu Putra
NPM : 1621010003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk. Tentang Perceraian Karena Dualisme Dalam Beragama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP : 196003291987031003


Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP : 197112041997032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

**Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk. TENTANG
PERCERAIAN KARENA DUALISME DALAM BERAGAMA (Studi Di
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang). Disusun oleh: BAYU PUTRA,
NPM: 1621010003, Fakultas: Syari'ah dan Hukum, Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah
telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:**

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.H., M.H

Penguji Pendamping I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji Pendamping II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {البقرة (٢): ٢٠٨}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta petunjuk yang menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ayahku tercinta (M.Rosyidi) dan ibuku tersayang (Suwarmi) yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do`anya dari membesarkan, merawat, mendidik, mendukung dan mencurahkan segala kasih dan sayangnya, serta memotivasi untuk memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk keberhasilanku.
2. Kakak aku tercinta, Mardiansyah, Yuliyana Sari, dan Risa Oktalia, yang telah memberikan dukungan, motivasi, do`a untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keponakanku Elhazima, Eliza Qaula, dan Arsakha Sopian Permana, yang hadir dan selalu memberikan semangat, senyuman dan kebahagiaannya dalam keberhasilan studiku.
4. Kawan Seperjuanganku Shofa Marwah, Indah Zulfa, Syauqi Mubarak Husni, Imam Nurcahyo, Dian Ramadhan, M.Wahyu Adi P, Khairul Ihwan A, Eriyadi Adha, M.Yoza Zajuli, M.Nurdin Syahputra, Antonius Fauzi Siregar, Bima Naratama, Agus Sibleie Gumentara, Rozian Jaya, Ari Vandi Azni, KKN 180, PPS Kelompok 1, Futsal ASFC, terima kasih buat Do`a dan dukungan yang menjadi Motivasiiku sampai terselesainya skripsi ini.

5. Sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan motivasi Dasef Ubaidillah, Dandy Saka Wijaya, Marwan Ghufon, M.Yusuf Ramadhani, Rido Kurniawan, Rahman Arif, M.Iqbal Abdusalam.
6. Teman-teman yang telah memberi masukan serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini Dina Rahma Tiara, Era Gunti, Ayu Desiyanti.
7. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Bayu Putra, Lahir di Bandar Lampung, 05 Desember 1997, Putra ketiga dari tiga bersaudara, dari perkawinan Bapak M.Rosyidi dan Ibu Suwarmi.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Amalia dan lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Prumnas Way Kandis, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhssiyyah di Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk. Tentang Perceraian Karena Dualisme Dalam Beragama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis skripsi ini tentu tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari`ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak H. Rohmat S.Ag., M.Hi., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.Hi., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah beserta staf akademik dan jajarannya yang telah membantu menyelesaikan persyaratan administrasi
6. Pimpinan beserta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan menyediakan buku-buku untuk bahan penelitian.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas ke ikhlasan Bapak/Ibu atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Akhir harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca

Wassalamu`alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Bandar Lampung
Penulis

Bayu Putra
NPM. 1621010003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metodologi Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	17
1. Perceraian Menurut Hukum Islam	17
a. Pengertian Perceraian.....	17
b. Dasar Hukum Perceraian.....	18
c. Macam-Macam Perceraian.....	21
d. Alasan Perceraian.....	28
e. Rukun dan Syarat Perceraian	33
f. Hikmah Perceraian	34
2. Perceraian Menurut Hukum Positif	35
a. Pengertian Perceraian.....	35
b. Dasar Hukum Perceraian.....	37
c. Alasan Perceraian.....	39
d. Prosedur Perceraian.....	41
e. Akibat Perceraian	47
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI DATA

A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	53
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	55
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	56
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	59
5. Kompetensi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	60
B. Potret Kehidupan Rumah Tangga Kasus Cerai Gugat Perkara No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk.	62
C. Duduk Perkara Dalam Putusan No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk.	64
1. Identitas Para Pihak	64
2. Deskripsi Duduk Perkara	64
3. Permohonan Gugatan	72
4. Amar Putusan	73
D. Dasar Pertimbangan Hakim PA Tanjung Karang dalam Memutus Perkara No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk. Tentang Cerai Gugat Karena Dualisme dalam Beragama	74

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk.	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara No.0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk.	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Putusan Nomor:0101/Pdt.G/2019/Pa.Tnk.**
- B. Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin**
- C. Surat Permohonan Izin Riset**
- D. Blangko Konsultasi Skripsi**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Sampel Nama yang di Wawancarai	14
Tabel 2 Daftar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	56
Tabel 3 Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.....	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan maksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Perceraian Karena Dualisme dalam Beragama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang”. Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.²
3. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.³
4. Perceraian adalah melepaskan ikatan, yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 393.

²Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 146.

³M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), h. 12.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 401.

5. Dualisme adalah paham bahwa di kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan atau tidak sejalan.⁵
6. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.⁶

Dari pengertian dan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, dapat di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peneliti akan menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang perceraian yang dikarenakan dualisme dalam beragama.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah telah terjadi perkawinan yang dilakukan secara Islam dan telah menyebabkan terjadi perceraian yang dikarenakan dualisme dalam beragama, sehingga sangat penting untuk diteliti.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif dari skripsi ini sesuai dengan ilmu yang ditempuh sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*...., h. 344.

⁶*Ibid.*, h.18.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci, perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan

⁷Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 h. 1.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga harta-harta benda dalam perkawinan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 43.

melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran Agama, perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mualaf* yang memenuhi syarat.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.¹⁰ Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama.¹¹ Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keharmonisan keluarga, apabila dalam keluarga sering kali terdapat perselisihan yang berujung keributan dalam hubungan suami isteri, maka diperintahkan untuk memediasi keduanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء (٦) ٣٥}

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat ini menjelaskan jika terjadi perselisihan suami istri dan mereka tidak mampu menyelesaikan perselisihan itu, maka Allah

⁹Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 2 h. 14.

¹⁰Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 1.

¹¹Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

memberikan petunjuk agar keduanya masing-masing menunjuk juru damai dari pihak keluarga untuk menyelesaikan konflik mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan dan masing-masing mendengarkan keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga.¹² Namun, apabila perdamaian tidak dapat diwujudkan dengan baik di samping itu tidak ada harapan untuk memperbaikinya lagi, maka Allah telah memberikan solusi yaitu sebuah perceraian.

Tetapi di dalam ajaran Agama Islam dilarang menikahi wanita atau pria yang berbeda keyakinan, kecuali dia sudah beriman, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَآءَ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة (٢): ٢٢١}

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 433.

walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam ayat ini menegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali mereka telah beriman. Walaupun mereka itu ganteng, gagah, kaya dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki mukmin lebih baik untuk dikawini dari pada mereka. Perkawinan erat hubungannya dengan Agama. Orang musyrik bukan orang beragama, mereka menyembah selain Allah. Dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan, bermasyarakat itu biasa saja. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka.¹³ Qatadah, seorang *mufassir* dari kalangan *tabi'in*, dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *musyrik* dalam surah Al-Baqarah Ayat 221 adalah penyembahan berhala pada saat Alquran turun, karena itu ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang *musyrik* selain bangsa Arab, seperti Cina.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, putusnya hubungan perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

¹³Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 1-3)* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 327-328.

¹⁴Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Marba'ahal Qahirah, 1960), h. 186-187.

1. *Thalag*

Talak atau *Thalag* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, talak terdiri dari beberapa macam: Talak *raj`i*, talak *ba`in sughro*, talak *ba`in kubro*, talak *sunny*, talak *bid`i*.¹⁵

2. *Khulu`*

Khulu` menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar *iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu`*.¹⁶

3. *Fasakh*

Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri. Adapun yang mengartikannya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang di anggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

4. *Zhihar*

Zhihar adalah perbuatan yang terkutuk dan haram hukumnya, dan orang yang men-*zhihar* istrinya harus membayar kafarat. *Zhihar* sebagai tindakan menyerupakan istri dengan perempuan yang

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h.149-150

¹⁶ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu*) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No. 1, (1 Juni 2014), h. 194.

diharamkan (mahram) baginya dengan tujuan mengharamkan sang istri bagi dirinya dan mengharamkan orang lain untuk menikahinya karena belum diceraikan.¹⁷

5. *Ila*

Menurut hukum Islam, *Ila* merupakan perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat.¹⁸

6. *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah SWT, apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. *Li'an* merupakan perceraian yang terjadi akibat sumpah suami bahwa isterinya telah melakukan perbuatan zina.¹⁹

Dalam putusan perkara No. 0101/Pdt.G/2019/P.A.Tnk, hakim memutuskan perkara ini harus mengikuti asas *ratio decidendi* yang segala putusan pengadilan agama yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.²⁰ Sehingga para pihak mengetahui alasan-alasan majelis hakim dengan jelas yang dijelaskan didalam suatu putusan. Pada perkara tersebut telah terjadi perkawinan seorang muslim yang di mana sebelum melakukan perkawinan calon suami beragama Kristen dan calon istri beragama Islam, calon istri meminta kepada calon suami kalau ingin menikahi dia harus pindah keyakinan (Agama) Islam, pada saat itu suami

¹⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 210- 220

¹⁸ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 124.

¹⁹ *Ibid*, 124-125

²⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 797.

pun setuju menjadi *mualaf* dan mengubah namanya, setelah menikah suaminya tidak menjalankan perintah Allah layaknya seorang muslim sampai istri memanggil ustad untuk mengajari suami belajar ngaji, dan saat mertua suami ingin datang ke rumahnya suami menyimpulkan foto pernikahan nya dan foto bertuliskan Arab. Selepas dari situ si istri diajak ke Jakarta untuk melakukan pemberkatan, istri memberontak tetapi, suami membujuk rayu istri dan keluarganya kalau ini hanya formalitas, setelah melahirkan anak pertama, suami memberikan nama anaknya tidak ada keIslaman nya maupun anak keduanya, setelah anak keduanya lahir istri dan keluarganya diajak liburan ke Jakarta, sampai sana mereka melakukan pembaptisan kepada anaknya dan kembali membujuk rayu istri kalau itu hanya formalitas, selepas dari itu mereka sering bercekcok atau ribut, istri mendapat masukan dari tetangganya kalau ada cara menyelesaikan masalah dia yaitu sebuah perceraian.

Permasalahan di atas telah terjadi perceraian antara suami istri yang disebabkan *syiqaq* yang dikarenakan dualisme dalam beragama. Oleh karena itu sangat penting bagi peneliti untuk membahasnya pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Perceraian Karena Dualisme dalam Beragama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tenjung Karang).”

D. Fokus Penelitian

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memfokuskan sekitar perceraian yang diakibatkan karena dualisme dalam beragama serta aspek hukum Islam-nya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara kasus cerai gugat dikarenakan dualisme dalam beragama ?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat mengenai perceraian karena dualisme dalam beragama.
2. Untuk mengungkap pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara kasus cerai gugat yang disebabkan perceraian suami istri karena dualisme dalam beragama.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya

hukum Islam Keluarga dan hukum perdata mengenai perceraian dikarenakan dualisme dalam beragama.

2. Secara praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum perdata.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian

b. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan, mengamati gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Dan dalam hal ini, data yang bersumber dari hakim dan istri dalam perkara cerai gugat yang diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

c. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000), h. 40.

menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas; menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.²² Penelitian kualitatif ini dipilih karena data yang diambil dari penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara langsung kepada *informen* yang pernah terjadi pada masalah tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.²⁴ Data yang diperoleh dari Putusan perkara Pengadilan Agama No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tnk, serta wawancara dengan orang yang dimaksud dalam perkara itu.
- b. Sumber data sekunder yaitu merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti dokumentasi atau

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), h. 328.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3.

²⁴ *Ibid* h. 106.

putusan, buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sampel atau keseluruhan subyek dalam penelitian.²⁶ Dalam kasus cerai gugat ini terdapat 3 (tiga) hakim, 1 penggugat, dan 1 tergugat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi atau memilih jumlah tertentu dari keseluruhan populasi.²⁷ Dalam hal menentukan sampel ini, peneliti menggunakan tehnik *Purposive Sample*. *Purposive Sample* yaitu pemilihan subjek di dasarkan atas sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut erat dengan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya hanya mengambil beberapa orang dalam populasi, yang akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan.²⁸ Penelitian ini hanya mengambil sampel dengan melakukan wawancara secara langsung dengan *informen*.

²⁵S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung : Tarsito,1998), h.26.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 165.

²⁷*Ibid*, h.165.

²⁸*Ibid*, h.179.

Tabel 1

NO	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.	61 Tahun	Hakim
2.	Yosi Fatmayuni	39 Tahun	Ibu rumah tangga

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan *Informen* yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.²⁹ Dalam skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim dan penggugat secara mendalam (*dept interview*).
- b. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³⁰ Dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data perceraian dalam perkara ini.

²⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h.171.

³⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 141.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Rekontruksi Data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penulisan.³¹ Dan pengecekan terhadap data dan bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

b. Sistematisasi Data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³² Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klarifikasi dan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari *informen* yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik

³¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...., h. 29.

generasi yang mempunyai sifat umum.³³ Dalam skripsi ini, yang dianalisis adalah mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus cerai gugat yang dikarenakan dualisme dalam beragama. Data tersebut akan saya olah dengan baik dan selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I....*, h.80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Perceraian atau talak merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta jalan keluar yang layak untuk keduanya. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹

Talak diambil dari kata اطلاق, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Menurut *syara`*, melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.²

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana,2003), h. 124.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Amzah,2017), h. 255.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *مِيثَاقًا غَلِيظًا* “Perjanjian yang kokoh”.⁴

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum Perceraian terdiri dari :

1. Al-Qur'an

a) Q.S. At-Talaq (65) Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا { الطلاق (٦٥) : ١ }

Artinya: Wahai para Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta

³Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung:Pustaka setia, 1999), h. 8.

⁴*Ibid* ,h. 9.

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Penduduk arab jahiliyah melakukannya ketika melepas tanggungan dan dibatasi sebanyak tiga kali.

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair Rasulullah SAW. berkata: “Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan”. Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu ia kembali kemudian menalak lagi dengan maksud menyakiti wanita.⁵

b) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ {البقرة (٢): ٢٢٩}

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

c) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة (٢): ٢٢٧}

Artinnya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh.....*, h. 126.

2. Al-Hadits

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Tsauban, Rasulullah Saw Bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya: Dikabarkan kepada kami dari Ahmad bin Azhar, dikabarkan kepada kami dari Muhammad bin Fadl dari Hamad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Tsauban berkata Rasulullah Saw bersabda: (wanita mana saja yang meminta cerai dari Suaminya tanpa ada alasan (syar'i). Maka haram baginya bau surga.) (H.R Ibnu Majah)

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu

Umar, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)⁷

Artinya: "Telah Menceritakan kepada kami Kasir bin`Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaid, dari Mu`arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsaar, dari Ibnu Umar ra. Rasulullah bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Daud)

⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah,t.t), h. 222.

⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiyah, 2011),h. 120.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa perceraian itu hukumnya boleh dilakukan selama ikatan pernikahan itu tidak bisa dipertahankan lagi.

c. Macam-macam Perceraian

Talak dapat dibedakan dengan melihat beberapa keadaan. Dengan melihat keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak dapat dilihat dari beberapa aspek dan macamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Talak macam ini disebut *talak sunni* atau yang pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa *iddah*-nya dengan arti segera setelah jatuhnya talak. Si istri langsung masuk dalam perhitungan *iddah*-nya.⁸ Ada empat syarat dalam talak *sunni*, yaitu:
 - a) Istri yang ditalak dan sudah digauli, jika belum digauli bukan termasuk talak *sunni*.
 - b) Istri dapat segera melakukan *iddah*-nya suci setelah ditalak, maksudnya dia masih dalam keadaan suci dari

⁸Amir Syariduddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2005),h. 130.

haid, menurut ulama Syafiyah hitungan *iddah*-nya wanita adalah tiga kali suci dan bukan tiga kali haid.

- c) Talak yang dijatuhkan ketika istri masih dalam keadaan suci.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri, selama masa suci talak itu dijatuhkan.
2. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang dalam haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak dalam bentuk ini disebut *talak bid'iy*, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi, hukumnya haram. Alasannya adalah dengan cara ini perhitungan *iddah*-nya istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung *iddah*-nya.⁹
3. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:
- a. Talak *raj'i*, yaitu talak si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*-nya. *Talak raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
 - b. Talak *Bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali

⁹*Ibid*, h. 130.

dengan nikah baru. Talak *bain* ini juga dibagi dalam dua macam:

- a) *Bain sughro*, adalah talak satu atau talak dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Dalam bentuk ini suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.
- b) *Bain kubro*, adalah talak tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. *Bain kubro* ini menyebabkan suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa *iddah*-nya.¹⁰

4. Talak ditinjau dari segi susunan kata (*shighat*) yang digunakan untuk talak:

- a. Talak *tanjiz* atau talak langsung, yaitu talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada suatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya talak itu. Maka, talak seketika berlaku, seperti suami kepada istrinya “sekarang engkau saya talak”.

¹⁰*Ibid.*, h. 130-131.

- b. Talak *ta'liq* atau talak bergantung, yaitu talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami kepada istri; “jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuhlah talak saya kepadamu” atau “ jika sampai jam enam sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau”.¹¹

5. Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam talak, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *Sharih/ Dzohir*

Yaitu kata-kata yang digunakan jelas dan tegas, dapat dengan mudah dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. Menurut Ahl Al-Zhahiriyyah talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan tiga kata: talak, *firoq* dan *sarah*.

Apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan talak *sharih* maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang suami dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan suatu apapun.

b. Talak *Kinayah*

Yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran seperti :

- a) Engkau sekarang telah jauh dariku
- b) Selesaikan sendiri segala urusanmu

¹¹Zahry Hamid, *pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (yogyakarta: Bina Cipta, 2008), h. 74-76.

- c) Susul-lah keluargamu sekarang juga
- d) Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendiri.

Ucapan-ucapan tersebut dimaksudkan dengan talak atau bisa juga mengandung makna lain. Menurut Taqiyuddin Al-Husaini itu tergantung kepada niat suami, artinya jika suami mengatakan itu dengan maksud talak maka jatuhlah talak itu, dan jika suami tidak dengan maksud mentalak maka tidak jatuh talak itu.¹²

- 6. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istri ada beberapa bentuk diantaranya:

- a. Talak dengan ucapan

Yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara langsung secara lisan di hadapan istrinya, dan istrinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.¹³

- b. Talak dengan tulisan

Yaitu talak yang dilakukan oleh suami secara tertulis kemudian dibaca oleh istrinya, dan istrinya tahu maksud isi tulisan tersebut dan talak itu jatuh meski dengan tulisan.¹⁴

- c. Talak dengan isyarat

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang tuna wicara, isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat

¹²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*..., h. 195.

¹³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali)* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 115.

¹⁴ *Ibid*, h. 115.

dipandang sebagai alat komunikasi, oleh karena itu isyarat baginya sama kedudukannya dengan ucapan dan biasa menjatuhkan talak dengan cara isyarat dan itu diperbolehkan selama maksudnya bertujuan mengatakan talak untuk memutus perkawinan.¹⁵

Fuqaha mensyaratkan, talak bagi tuna wicara dengan isyarat itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang buta huruf, tetapi bagi mereka yang mengetahui baca tulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat.

d. Talak dengan utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Al-Qur'an dalam kasus perceraian tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasan perceraian. Hukum islam juga tidak menekankan secara limitatif alasan perceraian itu. Seorang suami dapat saja mentalak istrinya karena tidak mencintai lagi, begitu pula Istri juga dapat meminta suami untuk tidak mencintai istrinya lagi.¹⁶

¹⁵*Ibid*, h. 115.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 43.

7. Bentuk perceraian selain talak

Selain perceraian yang terjadi karena talak, ada bentuk perceraian yang disebut *khulu`*, secara khusus apabila pemutusan ikatan perkawinan dilakukan suami disebut talak, maka pemutusan ikatan perkawinan oleh inisiatif istri disebut *khulu`*.

a. Pengertian *Khulu`*

Khulu` adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh*, kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.¹⁷

b. Dasar Hukum *Khulu`*

Khulu` adalah salah satu hak istri untuk meminta dilepaskan dari ikatan perkawinan dengan suaminya dikarenakan perkawinan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah timbul ketidak harmonisan rumah tangga. Masalah untuk meng-*khulu`* dengan alasan istri tidak senang kepada suaminya dapat dijadikan alasan kebolehan untuk minta *khulu`*, namun tidak senangnya harus terjadi dari kedua belah pihak. *Khulu`* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Swt Q.S :¹⁸

¹⁷Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: CV.TeamMsBarokah, 2015), h. 118.

¹⁸*Ibid*, h. 119-120.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ..... {النساء (٤) : ١٩}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

d. Alasan Perceraian

Menurut kitab-kitab *fiqh*, setidaknya ada beberapa macam kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu putusnya ikatan pernikahan selain talak dan *khulu'* yang telah disebutkan diatas, ada juga *nusyuz*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila'*, *li'an*, *zihar*, pembahasan singkatnya sebagai berikut:

1) *Nusyuz*

Secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian seperti ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami istri. Sedangkan ulama Hambaliah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁹ Dapat disimpulkan *nusyuz* dapat disimpulkan sebagai sebuah sikap istri yang tidak mau

¹⁹Saleh bin ganim al-saldani, *Nusyuz Alih Bahasa A.Syauqi Qadri* (Jakarta: Gema Insani Press cet VI, 2004), h. 25-26.

melaksanakan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁰

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- a) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami;
- b) Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami;
- c) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas;
- d) Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.²¹
- e) Menghianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain;

²⁰R.M.Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama,2015), h. 126-127.

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia,1999), h. 185.

- f) Memasukkan orang lain ke dalam rumah, yang mana suami tidak suka bila orang itu masuk ke dalam rumahnya, baik ketika suami ada maupun tidak ada;
- g) Lalai dalam melayani suami;
- h) Menghambur-hamburkan harta suami dan membelanjakan untuk sesuatu yang tidak pantas;
- i) Menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencelanya atau mencacinya;
- j) Menyebarkan rahasia suami dan menurunkan kehormatannya sebagai suami.²²

Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا {النساء (٤) : ٣٤}

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah

²²Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Dosa-dosa Suami Isteri Yang Meresahkan Hati* (Solo: Kiswah, 2011), h. 53.

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

2) Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadinya antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.²³ Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
النساء (٤) : ٣٥

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

3) Fasakh

Fasakh berarti merusak atau melepasi tali ikatan pernikahan, terjadi sebab yang dengan akad nikah (yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.²⁴

4) Ila`

Ila` adalah suami bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap istrinya sendiri bahwa dia tidak akan menggaulinya.²⁵ Allah SWT berfirman:

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media,2006), h. 241.

²⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*...., h. 142.

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۚ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة (٢): ٢٢٧}

Artinya: kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

5) Li`an

Li`an adalah sumpah suami menuduh istrinya telah berbuat zina.²⁶ Allah SWT Berfirman:

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ۚ وَالْخَمْسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ {البور (٢٤): ٨-٩}

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

6) Zhihar

Zhihar seorang suami berkata kepada istrinya “ bagiku kamu seperti punggung ibuku”, sambil memulai sikap tidak bersedia menggaulinya lagi.²⁷ Allah SWT Berfirman:

²⁵*Ibid*, h. 132.

²⁶*Ibid*, h. 136.

²⁷*Ibid*, h. 127.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب (٣٣): ٤}

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

e. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan, dan masing-masing unsur memiliki persyaratan tertentu, yaitu:

1. Suami yang mentalak istrinya mestilah seseorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakannya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaannya. Dengan begitu talak yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tersalah dalam ucapannya tidak sah talak yang diucapkannya.
2. Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak suaminya, namun masih berada dalam masa *iddah*-nya. Dalam keadaan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak, perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau

pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa *iddah*-nya tidak boleh ditalaknya.

3. *Shigat* atau ucapan talak yang dilakukan oleh si suami menggunakan lafaz talak, sarah atau lafaz lain yang semakna dengan itu. Misalnya ucapan yang memutus hubungan pernikahan, seperti cerai. Namun dapat juga ucapan talak menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut dengan *kinayah*, namun untuk itu dipersyaratkan niat si suami yang mengucapkannya.

Ucapan talak dapat dilakukan pula dengan secara lisan dan langsung, dapat juga dilakukan dengan tulisan yang dapat dipahami maksudnya, dengan perantara orang lain, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu yang dapat dipahami oleh orang yang melihat maupun mendengarnya.²⁸

f. Hikmah Perceraian

Meskipun talak dibenci dalam suatu rumah tangga, tetapi sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak atau perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini juga, rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 128

kepada dua belah pihak dan orang yang ada di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih jauh, lebih baik ditempuh langkah perceraian dalam bentuk talak, dengan demikian talak dalam Islam untuk sesuatu tujuan maslahat.²⁹

2. Perceraian Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perceraian

Setiap manusia pasti mencita-citakan agar pernikahannya dapat berlangsung kekal abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputus di tengah jalan. Tetapi adakalanya, suatu pernikahan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Sebab-sebab itu sangatlah banyak sepanjang sejarah kehidupan pada manusia.³⁰

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya pernikahan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan pernikahan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem pernikahan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan,

²⁹*Ibid*, h. 127-128

³⁰Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan dan ketidak-bahagiaaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.³¹

Perceraian adalah ikatan pernikahan antara seorang pria dengan wanita sudah putus. Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat diartikan ikatan perkawinan suami istri itu sudah putus / bercerai antara seorang pria dengan seorang wanita.³²

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³³

Sementara dalam aspek yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan

³¹H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 38.

³²H.Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 73.

³³Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2016), h. 109.

yang telah ditentukan oleh peraturan per-Undang-Undangan.³⁴ Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.³⁵

b. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pasal yang membahas tentang perceraian pasal 38 menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian

Kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdatanya, akan tetapi kematian pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, baik dari suami maupun istri.³⁶

2. Perceraian

Perceraian adalah salah satu cara pembubaran pernikahan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.³⁷

³⁴Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

³⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 25.

³⁶Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional....*, h. 136.

³⁷*Ibid*, h. 136

3. Atas keputusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh istri, yang putusanya perkawinan tersebut berdasarkan putusan pengadilan.³⁸

Pasal 39 menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dalam Pasal menyebutkan Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, serta tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Terakhir pasal 41 menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

³⁸*Ibid* h. 137

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁹

Sumber hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang perceraian, pasal 14 menjelaskan: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 menjelaskan bahwa perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.⁴⁰

c. Alasan Perceraian

Pada dasarnya suatu pernikahan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan lain

³⁹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38-41

⁴⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

yang menyebabkan.⁴¹ Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;⁴²
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Tidak jauh beda dengan penjelasan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan, hanya

⁴¹Sri Soesilawaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 61.

⁴²H. A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.....*, h. 42.

⁴³ *Ibid*, h. 42-43.

terdapat dua penambahan alasan dalam melakukan perceraian, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak; dan
- b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁴

d. Prosedur Perceraian

Jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang tidak bisa di damaikan lagi, maka bisa diselesaikan dengan perceraian di Pengadilan Agama. Perikatan pernikahan bisa putus dengan cerai talak jika suami mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, dan perikatan pernikahan juga bisa putus dengan gugat cerai jika istri mengajukan gugatan dan diputus oleh Majelis Hakim.⁴⁵ Maka, jika suami atau istri ingin bercerai, harus mengikuti prosedur perceraian dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang tata cara penetapan gugatan. Gugatan didefinisikan sebagai tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau mewakili sekelompok orang dengan dasar hukum yang sama.⁴⁶ Dalam mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan ada beberapa prosedur, antara lain:

⁴⁴P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia.....*, h.96.

⁴⁵Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 54.

⁴⁶*Ibid*, h. 54

1. Pendaftaran Perkara di Pengadilan

Setelah surat gugatan atau permohonan selesai dibuat dan dilampiri dengan syarat umum, serta ditambah syarat khusus, maka didaftarkanlah surat gugatan itu ke Pengadilan Agama pada bagian kepaniteraan perkara. Setelah didaftarkan surat gugatan itu diperiksa, pemeriksaan itu mengenai surat gugatan sudah benar dan memenuhi persyaratan, yaitu identitas pihak-pihak, dan bagian posita dan petitanya, serta perkara yang diajukan itu baik kompetensi relatifnya dan absolutnya merupakan wewenang Pengadilan Agama yang bersangkutan. Jika surat gugatan sudah benar, lengkap dan memenuhi persyaratan, maka selanjutnya pihak-pihak baik pengugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk sidang.⁴⁷

2. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang

a) Penunjukan Majelis Hakim

Setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, maka panitera wajib secepatnya untuk menyampaikan berkas perkara itu kepada ketua, ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dengan surat penetapan yang ditulis “penunjukan majelis hakim”. Penunjukan majelis hakim

⁴⁷Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 41.

juga harus menunjuk panitera sidang, karena panitera sidang sifatnya membantu majelis hakim dalam hal kelancaran proses pemeriksaan perkara.⁴⁸

b) Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, dia akan menentukan hari sidang pertama untuk perkara itu, setelah perkara itu sudah ditetapkan, panitera menunjuk seorang juru sita untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal yang telah ditulis dalam surat penetapan hari sidang.⁴⁹

c) Pemanggilan Para Pihak

Karena pentingnya sidang pertama bagi kedua belah pihak, maka pemanggilan kepada para pihak harus betul-betul diperhatikan oleh petugas untuk pemanggilan tersebut, petugas yang ditunjuk oleh majelis hakim adalah seorang juru sita, dengan memanggil pihak-pihak juru sita dengan membawa surat relaas pemanggilan. Dalam pemanggilan kepada para pihak, hakim harus mempertimbangkan dekat jauhnya jarak antara tempat tinggal para pihak dengan pengadilan.⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, h. 42.

⁴⁹*Ibid*, h. 43-44.

⁵⁰*Ibid*, h. 46.

3. Persiapan Sidang

Setelah pemanggilan dan sudah ditetapkan dan tercantum dalam surat panggilan, maka panitera pengganti mempersiapkan ruang sidang, seperti mempersiapkan palu hakim, pengeras suara, serta membuka jendela, pintu ruang sidang dan mengecek kursi pihak-pihak, jika semua sudah siap, maka persidangan siap dimulai.⁵¹

4. Pemeriksaan Perkara

a) Sidang Pertama (Pemeriksaan Identitas Para Pihak)

Sidang pertama memiliki arti penting baik bagi pengadilan, penggugat, dan tergugat, karena kehadiran pihak-pihak akan menentukan jalannya persidangan selanjutnya. Setelah semua pihak hadir dalam persidangan, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum apabila ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan maka sidang tertutup untuk umum, dengan ketukan palu tiga kali. Setelah itu majelis hakim memeriksa identitas pihak-pihak, terlebih dahulu untuk mencocokkan, setelah itu majelis hakim melakukan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan cara mediasi⁵²

⁵¹*Ibid*, h. 47.

⁵²*Ibid*, h. 49.

b) Sidang II (Pembacaan Surat Gugatan)

Sebelum pembacaan surat gugatan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi. Selanjutnya pembacaan surat gugatan, pada tahap ini pihak penggugat berhak meneliti ulang dalil gugatan dan petitum sudah benar dan lengkap.⁵³

c) Sidang III (Jawaban Gugatan)

Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingan terhadap Penggugat melalui Majelis Hakim, jawaban juga bisa berupa bantahan.

d) Sidang IV (Replik)

Sidang keempat ini adalah kesempatan bagi penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat, penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan mempertahankan atas serangan tergugat.⁵⁴

e) Sidang V (Duplik)

Duplik dari tergugat, tergugat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat, replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.⁵⁵

⁵³*Ibid*, h. 50.

⁵⁴Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 74.

⁵⁵*Ibid*, h. 74.

f) Sidang VI (Pembuktian)

Penguat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan, begitu pula tergugat mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya, masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

g) Sidang VII (Kesimpulan)

Masing-masing pihak diberi kesempatan baik penggugat maupun tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung sebelum hakim mengeluarkan putusannya.

h) Sidang VIII (Putusan Hakim)

Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengkataan.⁵⁶ Serta harus mengikuti asas *ratio decidendi* yang segala putusan pengadilan agama yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sehingga para pihak dapat mengetahui alasan-alasan majelis hakim dengan jelas yang disampaikan dalam suatu putusan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, h. 75.

⁵⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 797.

e. Akibat Perceraian

Pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan bahwa akibat putusnya perceraian adalah:

1. Baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan antara suami dan istri mengenai anak maka pengadilan yang akan memberikan keputusannya;
2. Ayah harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, dan bila mana ayah dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban anak itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang akan membiayai anak itu;⁵⁸
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan untuk istri dan menentukan kewajiban bagi mantan istri.

Dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan, suatu perkawinan yang telah putus atau gugat cerai oleh karena adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak baik istri maupun suami yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan.⁵⁹ Beda halnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkawinan yang sudah

⁵⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat), h. 44.

⁵⁹ *Ibid*, h. 44.

diputuskan karena adanya putusan cerai (pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), berdampak pada beberapa hal yaitu:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Bila ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita atau kerabat sedarah garis samping dari ibu, dan bisa juga wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. Pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak-hak hadhanah oleh pengadilan agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmana dan rohani bagi anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi;⁶⁰
4. Semua biaya nafkah dan hadhanah anak menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu menjadi dewasa dan dapat mengurus dirinya (21 Tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah dan hadhanah bagi anak, pengadilan agama berhak memberikan keputusan kepada suami dan istri tersebut, pengadilan juga berhak

⁶⁰Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139.

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya (hadhanah).⁶¹

Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.⁶²

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian *pertama* yang berhasil peneliti temukan adalah yang dilakukan oleh Ahmad Bayhaqy dengan judul “ Cerai Talak oleh Suami Murtad (Analisis Putusan Nomor 2431/Pdt.G/2011/PA.Tgrs)” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsekuensi hukum bagi pemohon cerai

⁶¹*Ibid*, h. 139.

⁶²Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional....*, h. 139-140.

talak yang diajukan oleh suami murtad menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fiqh. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan obyek penelitian salinan putusan yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Hasil penelitiannya adalah konsekuensi hukum bagi pasangan Suami istri yang tetap melanjutkan perkawinannya setelah salah satu pihak melakukan *riddah* menurut Undang-Undang di Indonesia perkawinannya tersebut masih dalam kategori sah, selama pasangan tidak mempermasalahkannya ke Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama bersifat pasif, tidak serta merta dapat merusak perkawinan, akan tetapi dalam tinjauan fiqh sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pasangannya melakukan *riddah*, maka status pernikahannya *fasakh* (batal demi hukum) tanpa harus melalui proses persidangan.

Penelitian *kedua*, berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Imam Nurcahyo dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Disparitas Putusan Hakim pada Perkara Perceraian Pasangan yang Murtad (Studi pada Putusan Nomor:8/Pdt.G/2011/Pa.Gst. dan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras).” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas putusan hakim pada perkara perceraian pasangan yang murtad ditinjau dari aspek hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif analitis* yang merupakan penelitian kualitatif.

Dengan obyek penelitian Al-Qur'an dan putusan Nomor: 8/Pdt.G/2011/Pa.Gst Pengadilan Agama Gunungsitoli dan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras Pengadilan Agama Karang Asem. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam penetapan suatu keputusan oleh majelis hakim dipertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan penggugat dan tergugat serta segala kemungkinan untuk kembali dalam ikatan perkawinan. Majelis hakim memutuskan menjatuhkan talak *bain sughra* hal ini dikarenakan penggugat yang merupakan istri ini telah murtad dan kembali ke agamanya yang semula yakni Kristen Protestan. Perempuan Agama Kristen dalam Agama Islam dipandang sebagai ahli kitab sehingga tetap sah perkawinannya. Sebaliknya pada perkara cerai yang kedua diketahui tergugat yakni suami telah murtad dan kembali ke agamanya yang semula yakni Agama Hindu. Dalam Agama Islam tidak sah apabila wanita muslim dinikahkan dengan selain lelaki muslim. Oleh karena itu *fasakh* perkawinan mereka. Bahwa majelis hakim memutuskan penjatuhan talak atau penetapan *fasakh* berdasarkan fakta persidangan dan latar belakang Agama masing-masing pihak.

Dan Penelitian *Ketiga*, berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Febriana Feramitha, dengan judul “Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah perkawinan pasangan yang berbeda agama yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini telah mengakibatkan adanya penyelundupan hukum terhadap peraturan per-

Undang-Undang di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya peraturan khusus baik untuk melarang maupun mengizinkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang berbasis dengan Undang-Undang, Yurisprudensi, buku-buku, Al-Qur'an, Hadits-hadits, Fatwa MUI. Metode ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, Kesimpulan dalam skripsi ini adalah ternyata atas dasar kekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalang tersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yang meninggal dunia untuk memberikan harta warisannya kepada kerabat dekat yang terhalang dalam mendapatkan warisannya.

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain, yaitu:

1. Tidak ada skripsi tersebut yang membahas tentang perceraian karena *Syiqaq* yang disebabkan karena dualisme dalam beragama.
2. Skripsi ini merupakan skripsi yang membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian *khulu'* yang disebabkan *syiqaq* karena suami mualaf tetapi menutupi ke-Islamannya.
3. Membahas tentang kemualafan seorang suami tetapi tidak sepenuhnya menunjukkan kemualfannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Tafsir

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiah, 2011.

Aljurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatu At-tasyri Wa Falsafatuhu Juz II*, Singapura: Haromain, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Jalaluddin Al-Sayuthi, *Asybah wa An-Nazhair fil Furu'*, Surabaya: Maktabah Ibn Subhan wa Auladahu Ghairu sunnah, t.t

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, t.t.

Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Mesir: Marba'ahal Qahirah, 1960

B. Buku Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

-----, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, TeamMsBarokah, 2015.

R.M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Buku Hukum, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Manan, M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.

Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Peradilan Agama Dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2000.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006.

H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2016.

Kompilasi Hukum Islam

M.Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hamnali)*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2015.

Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Wiernarsih Imam Subekti, Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2008.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

D. Buku-Buku Penunjang dan Jurnal

A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosydakarya, 2000.

Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Dosa-Dosa Suami Isteri yang Meresahkan Hati*, Solo: Kiswah, 2011.

Rais, Isnawati, “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No. 1, 1 Juni 2014

S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.

Saleh Bin Ganim Al-sadani, *Nuzyuz Alih Bahasa A.Syauqi Qadri*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

E. Wawancara

H.K.M. Junaidi, Wawancara dengan Penulis, Secara Langsung, di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 16 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB.

Yosi Fatmayuni, Wawancara dengan Penulis, Secara Langsung, di Prumdarn Tanjung Raya Permai, Bandar Lampung, 15 September 2019, Pukul 19.00 WIB.